



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

OPTIMALISASI PEMENUHAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN MAMASA SULAWESI BARAT

Supriadi Torro, Zainal Arifin

Program Studi Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial UNM

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk; 1) Untuk memperoleh gambaran pemenuhan Standar Pelayanan minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa, dan 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemenuhan Standar Pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsi tentang penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pada pendidikan dasar di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat. Informan penelitian ditentukan secara purposive sampling dengan kriteria kepala sekolah, guru, staf diknas, dan tokoh masyarakat. Teknik pengumpulan data melalui; observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dengan reduksi data, model data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; 1) Gambaran pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM-Dikdas) di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat dengan 27 indikator pencapaian (IP) hanya IP-1, IP-5, IP-13 yang tingkat pencapaiannya hingga 100%, sedangkan yang lainnya masih terdapat gap atau kekurangan-kekurangan.

Kata kunci: *Optimalisasi SPM-Dikdas, faktor penghambat, dan faktor pendorong*

PENDAHULUAN

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar (SPM DIKDAS) adalah salah satu tolok ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pendidikan dasar sesuai SPM merupakan kewenangan dan tanggungjawab Kabupaten/Kota, pemerintah Kabupaten/Kota wajib melakukan pengembangan kapasitas untuk mencapai SPM. Sedangkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memfasilitasi pengembangan kapasitas melalui peningkatan kemampuan sistem, kelembagaan, personil dan keuangan, baik di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Satuan Pendidikan

Keterlibatan semua stakeholder pendidikan dalam mendukung pemenuhan SPM Dikdas adalah modal yang diharapkan terjadi. Pasalnya pendidikan Indonesia saat ini masih terbelakang di Negara ASEAN. Menurut Tilaar (2006:10) memasuki abad ke 21, dunia pendidikan Indonesia dihebohkan dengan keterbelakangan, yang disebabkan oleh



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

arus globalisasi dan kebijakan pemerintah ORDE Baru yang memprioritaskan kuantitas daripada kualitas pendidikan. Akibatnya pendidikan Indonesia memasuki Orbit kegagalan (Surakhmad, 2000:126).

Kebijakan pendidikan Indonesia memang sudah berubah sejak dimulai dari era otonomi daerah, namun substansi perubahan itu belum menyentuh pada akar masalah yang muncul selama ini, seperti pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan akses pendidikan. Menurut Nugroho (2008:28-9) dengan otonomisasi dan desentralisasi pendidikan diharapkan semua komponen daerah lebih terpacu memberdayakan diri, mengembangkan mutu kompetensial sumberdaya manusia, menumbuhkan prakarsa dan meningkatkan peran serta masyarakat. Dalam teori manajemen pendidikan ruang untuk bergerak bagi manager telah terkondisikan, sehingga seorang manager sudah mudah melakukan pengelolaan organisasi. Ada empat faktor yang paling penting dalam mempengaruhi perilaku manajemen pendidikan, yakni organisasi pendidikan, lingkungan, sistem pendidikan nasional dan manager pendidikan (Usman, 2008:11). Modernisasi dan demokratisasi pendidikan secara otomatis memunculkan kreativitas, jika peran Negara tidak lagi menjadi dominan dan masyarakat muncul kesadarannya untuk terlibat dalam peningkatan kualitas pendidikan..

Proses pendidikan dalam *stakeholder society* adalah merubah masyarakat tradisonil, dimana proses pendidikan yang tidak lebih dari sebagai proses mesin kekuasaan yang besar yaitu Negara ke arah partisipasi aktif yang kolaboratif. Menurut Tilaar (2012:347) Apabila struktur kekuasaan begitu besar, maka proses pendidikan akan menjadi secara otomatis tanpa kreativitas. Kebijakan pendidikan di era otonomi daerah menurut Tuti (2005:11) bahwa banyak aspek pendidikan yang harus di evaluasi baik oleh pemerintah maupun oleh kabupaten/kota itu sendiri. Sekarang saatnya kabupaten/kota dengan melibatkan stakeholder pendidikan akan memacu diri dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayahnya masing-masing yang dimulai dari penenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Berdasarkan Modul SPM (2015) yang dikeluarkan oleh Kemendikbud kerjasama dengan ADB dan Uni Eropa, terdapat 27 indikator SPM Dikdas yang terdiri dari dua bagian, yakni 14 item yang menjadi tanggungjawab kabupaten/kota dan 13 yang menjadi wewenang tingkat satuan pendidikan.

Ketentuan pasal 2 Permendikbud No 23 tahun 2013 bahwa penyelenggaraan pelayanan pendidikan dasar yang menjadi kewenangan kabupaten adalah berkaitan dengan akses, kenyamanan belajar siswa, sarana dan prasarana, tenaga pendidikan dan kependidikan serta pengawas sekolah. Sedangkan 13 item lainnya yang menjadi kewenangan tingkat satuan pendidikan terdiri dari; ketersediaan buku, alat laboratorium, kurikulum dan kelender akademik, jam mengajar guru, supervisi kepala sekolah, dan pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah.

Dari indikator tersebut, oleh Program PKP SPM diknas yang disponsori Uni Eropa telah melakukan studi awal yang diberi nama *Status Qua Assessment (SQA)* yang mendapat gambaran bahwa di Kabupaten Mamasa memiliki pencapaian SPM yang sangat rendah. Sebagai contoh adalah pada pemenuhan buku teks, yang tidak sampai 5% sekolah yang dijadikan sampel yang memiliki kecukupan buku. Begitu pula dengan alat laboratorium, angkanya juga sangat memprihantikan dengan 0%. Artinya tidak ada satupun sekolah di Kabupaten ini yang memiliki alat laboratorium yang standar. Indikator lain yang memiliki angka yang rendah adalah setiap satuan pendidikan hanya diisi oleh peserta didik untuk SD/MI tidak lebih dari 32 dan untuk SMP/MTs tidak lebih dari 36. Masing-masing jenjang hanya menyumbang pada angka 23 dan 34%. Artinya pada jenjang SD/MI masih terdapat 77 sekolah/-madrasah yang jumlah muridnya melebihi 32 orang.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Berdasarkan studi awal tersebut, sehingga perlu dilakukan mendalaman tentang pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan, yang menjadi dasar kemajuan pendidikan Indonesia pada umumnya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pengertian umum standar adalah tolak ukur atau dasar penilaian terhadap suatu kemajuan pekerjaan. Pengertian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 adalah satu tolak ukur kinerja pelayanan pendidikan dasar. Standar pelayanan minimal menentukan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Adapun indikator SPM yaitu tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu, berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Standar menurut Tilaar (2006:34) adalah kompetensi yang berisi kualitas terhadap suatu aktivitas atau produk. Lahirnya konsumen yang semakin cerdas sehingga menuntut produk-produk serta servis yang memberikan kepuasan, kemudahan, kecepatan pemberian serta ketepatan pelayanan. Dikatkan dengan pelayanan SPM, tentu dalam dokumen Administrasi Program (PAP) PKP-SPM Dikdas secara jelas dikemukakan bahwa hasil yang diharapkan dari pelaksanaan Program PKP-SPM DIKDAS adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas pengelola pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota dan manajemen di tingkat sekolah/madrasah dalam pencapaian SPM.
2. Meningkatnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat (misalnya Komite sekolah/madrasah), Dewan Pendidikan. LSM peduli pendidikan dan pemangku kepentingan bidang pendidikan terhadap SPM sektor pendidikan, serta mendorong partisipasi masyarakat yang lebih besar untuk memastikan bahwa sekolah/madrasah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pemenuhan SPM Dikdas.
3. Meningkatnya pengintegrasian SPM yang lebih efektif ke dalam berbagai program dan kebijakan sektor pendidikan terkait.
4. Sesuai Modul SPM Diknas (2014:4) standar pelayanan minimal memiliki nilai yang sangat strategis baik bagi pemerintah (daerah) maupun bagi masyarakat, yaitu:
 - a. Pertama, bagi pemerintah daerah: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai tolak ukur (*benchmark*) dalam penentuan biaya yang diperlukan untuk membiayai penyediaan pelayanan.
 - b. Kedua, bagi masyarakat: standar pelayanan minimal dapat dijadikan sebagai acuan mengenai kualitas dan kuantitas suatu pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah (daerah).

Dengan demikian pelayanan yang bermutu/berkualitas adalah pelayanan yang berbasis masyarakat, melibatkan masyarakat dan dapat diperbaiki secara terus



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

menerus. Disisi lain, pemerintah dituntut untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam hal pelayanan dalam masyarakat.

Tujuan Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pemerinta telah membuat kebijakan dalam memenuhi pelayanan dasar di bidang pendidikan. Berdasarkan Modul SPM Dikdas (2014:6) bahwa tujuan dari penyusunan SPM, adalah:

- a. Pedoman bagi BLU (Badan Layanan Umum) dalam penyelenggaraan layanan kepada masyarakat;
- b. Terjamin hak masyarakat dalam menerima suatu layanan;
- c. Dapat digunakan sebagai alat untuk menentukan alokasi anggaran yang dibutuhkan;
- d. Alat akuntabilitas BLU dalam penyelenggara layanan;
- e. Mendorong terwujudnya check and balances, dan;
- f. Terciptanya transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan layanan BLU.

Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dikdas

Indikator yang dikembangkan oleh pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah terdapat 27 bagian yang terdiri dari dua kewenangan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013, tentang perubahan atas peraturan menteri pendidikan nasional nomor 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar di kabupaten/kota terdapat 14 indikator pelayanan pendidikan dasar oleh kabupaten/kota dan 13 indikator pelayanan pendidikan dasar oleh satuan pendidikan yaitu sebagai berikut:

- a. Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Kabupaten/Kota;
 1. Tersedianya satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km jalan darat/air untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil.
 2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis.
 3. Setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktek IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik.
 4. Setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staf kependidikan lainnya; dan disetiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

5. Setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
 6. Setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;
 7. Setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
 8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
 9. Setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Pendidikan Kewarganegaraan;
 10. Setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 11. Setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 12. Setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah dan madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
 13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif, dan;
 14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.
- b. Pelayanan Pendidikan Dasar Oleh Satuan Pendidikan;
1. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan Pendidikan Kewarganegaraan, dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 2. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
 3. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
 4. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 buku referensi;
 5. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran,



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan;
6. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu pertahun dengan kegiatan pembelajaran sebagai berikut:
 - a. Kelas I – II : 18 jam per minggu;
 - b. Kelas III : 24 jam per minggu;
 - c. Kelas IV – VI : 27 jam per minggu; atau
 - d. Kelas VII – IX : 27 jam per minggu;
 7. Satuan pendidikan menerapkan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) sesuai ketentuan yang berlaku;
 8. Setiap guru menerapkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampuhnya;
 9. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
 10. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
 11. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada kepala sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
 12. Kepala sekolah atau madrasah menyampaikan laporan hasil ulangan akhir semester (UAS) dan ulangan kenaikan kelas (UKK) serta ujian akhir (US/UN) kepada orangtua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor kementerian agama di kabupaten/kota pada setiap akhir semester; dan;
 13. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).

Teori Pelayanan Publik

Berbagai konsep tentang pelayanan banyak dikembangkan oleh para ahli yang pada dasarnya menyatakan bahwa jasa sering dipandang sebagai sesuatu yang rumit. Kata “jasa” itu sendiri mempunyai banyak definisi, mulai pelayanan personal (*personal service*) sampai jasa sebagai produk. Tjiptono (2004:94) menyatakan bahwa “pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan manusia”.

Sedangkan istilah publik berasal dari bahasa Inggris yaitu “*public*” yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata “*public*” sesungguhnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi “publik” yang berarti umum, orang banyak, dan ramai. Selain itu, publik juga dapat diartikan sebagai sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap atau tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai atau norma yang berlaku.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Oleh karena itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu perkumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Lebih jauh dikatakan bahwa pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Teori Pelayanan Prima

Pelayanan seperti yang dikemukakan di atas akan menjadi baik ataupun maksimal ketika sipemberi layanan disatu pihak dan penerima layanan dipihak lain melakukannya dengan tujuan hanya sekedar membantu atau adanya permintaan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya secara sukarela. Pelayanan prima (*excellent service*) berarti pelayanan yang sangat baik atau pelayanan yang terbaik. Pelayanan pada satu aspek tidak bisa disepelekan dalam persaingan dalam berbagai bidang termasuk bisnis apapun. Karena dengan pelayanan konsumen akan menilai kemudian menimbang apakah selanjutnya dia akan loyal kepada pemberi layanan tersebut.

Nurhasyim (2004:16) menyatakan bahwa pelayanan prima adalah:

- a. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa.
- b. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.
- c. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap pelayanan standar dan maksimal.
- d. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal.

Oleh karena itulah, apabila ingin menarik konsumen dengan sebanyak-banyaknya harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan utama para konsumen atau sipenerima layanan secara maksimal (prima) sesuai dengan kebutuhannya. Barata (2004:10) menyatakan bahwa “suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani”.

Kasmir (2005:15) menyebutkan ciri pelayanan yang baik yang dapat memberikan kepuasan kepada pihak yang dilayani, yaitu:

- a. Memiliki karyawan yang profesional khususnya yang berhadapan langsung dengan pelanggan.
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang baik menunjang kelancaran produk kepada pelanggan secara cepat dan tepat.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- c. Bertanggungjawab kepada setiap pelanggan dari awal hingga selesai.
- d. Mampu berkomunikasi dengan jelas, menyenangkan dan menangkap keinginan dan kebutuhan pelanggan.
- e. Memberikan jaminan kerahasiaan setiap transaksi terutama dalam hal keuangan.
- f. Mampu memberikan kepercayaan kepada pelanggan sehingga merasa yakin dengan apa yang telah dilakukan perusahaan.

Teori Pendidikan

Selain teori sosial yang dijadikan dasar berpikir dalam penelitian ini, juga dikembangkan dari teori pendidikan. Menurut Komaruddin (2010:33) segenap pendidik dan insan yang peduli pendidikan membutuhkan pemahaman beragam teori pendidikan yang berkembang di berbagai negara, sehingga menjadi masukan yang merupakan referensi bagi alternatif layanan pendidikan yang lebih baik. Teori tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Behaviorisme
Behaviorisme adalah posisi filosofis yang mengatakan bahwa untuk menjadi ilmu pengetahuan, psikologi harus menfokuskan perhatiannya pada sesuatu yang bisa diteliti nlingkungan dan perilaku daripada fokus pada apa yang tersedia dalam individu persepsi-persepsi, pikiran-pikiran, berbagai citra, perasaan- perasaan dan sebagainya.
- b. Kognitivisme
Kerangka kerja atau dasar pemikiran dari teori pendidikan kognitivisme adalah dasarnya rasional. Teori kognitivisme dalam belajar menjelaskan bagaimana orang-orang berpikir aliran ini menjelaskan bagaimana belajar terjadi dan menjelaskan secara alami kegiatan mental internal dalam diri kita.
- c. Konstruktivisme
Dalam kaitannya dengan pembelajaran, menurut teori konstruktivisme yang menjadi dasar bahwa siswa memperoleh pengetahuan adalah karena keaktifan siswa itu sendiri. Teori ini menganggap bahwa suatu proses pembelajaran yang mengondisikan siswa untuk melakukan proses aktif membangun konsep baru, pengertian baru dan penegtahuan baru berdasarkan data.
- d. Humanistik
Teori belajar yang humanistik pada dasarnya memiliki tujuan belajar untuk memanusiakan manusia. Oleh karena itu, proses belajar dapat dianggap berhasil apabila si pembelajar telah memahami lingkungannya dan dirinya sendiri. Dengan kata lain, pembelajar dalam proses belajarnya harus berusaha agar lambat laun ia mampu mencapai aktualisasi diri dengan sebaik-baiknya.

Indikator Kualitas Pendidikan

Sudarsono (Komaruddin, 2010:80) mengungkap masalah konsep pendidikan yang dikategorikan kurang tepat. Menurutnya, pendidikan yang hanya



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

mementingkan kecerdasan otak dibandingkan kecerdasan emosi dan spiritual telah menimbulkan masalah di masyarakat. Pendidikan dasar dan menengah yang seharusnya menjadi dasar penyemaian dan penyuburan nilai-nilai luhur dalam dimensi sosial, budaya, dan kemanusiaan kepada anak didik, menjadi tidak berdaya akibat tidak relevannya antara tuntutan kurikulum dan perkembangan kondisi sosial budaya baik lokal, nasional maupun global.

Peningkatan Kualitas Pendidikan (Tilaar, 2009:43) bukan hanya masalah dana, tetapi berkenaan dengan semua komponen dalam lembaga dan proses pendidikan seperti kurikulum, kualitas pendidik, sarana yang tersedia dan latar belakang sosial ekonomi peserta didik. Apabila semua sarana dan dana telah tersedia, juga belum berarti kualitas pendidikannya akan meningkat dan kualitasnya tinggi.

Dalam persoalan karakter atau moral (Zubaedi, 2012:5) memang tidak sepenuhnya terabaikan oleh lembaga pendidikan. Akan tetapi, dengan fakta-fakta seputar kemerosotan karakter pada sekitar kita menunjukkan bahwa ada kegagalan pada institusi pendidikan kita dalam hal menumbuhkan manusia Indonesia yang berkarakter atau berakhlak mulia.

Deve Meier (Yamin, 2008:15) menulis beberapa prinsip pokok terhadap kemajuan pendidikan, yaitu:

1. Adanya keterlibatan total stakeholder dalam meningkatkan pembelajaran;
2. Pendidikan bukanlah mengumpulkan informasi secara pasif, melainkan menciptakan pengetahuan secara aktif;
3. Kerjasama di antara stakeholder sangat membantu meningkatkan hasil pendidikan, dan;
4. Pendidikan berpusat pada aktivitas dan sering lebih berhasil daripada yang bukan berpendidikan.

Uraian di atas menjelaskan bahwa keterlibatan semua pihak dalam mendukung fungsi pendidikan sudah menjadi keharusan yang tidak bisa lagi dielakkan, jika pendidikan suatu daerah atau negara ingin dikembangkan. Kebutuhan pelayanan minimal dalam bidang pendidikan yang menjadi penilaian dasar bagi pemerintah atas upaya yang mereka lakukan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Mamasa Sulawesi Barat ± 80 km dari kota Polman atau dari kota Makassar ± 200 km. Jenis penelitian adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif tentang penyelenggaraan pemenuhan standar pelayanan Minimal (SPM) pada Pendidikan Dasar.

Teknik Pengumpulan

Metode pengumpulan data yang dilakukan yaitu:

- a. Observasi; Observasi dilakukan pada semua jenjang SMP dan MTs yang berjumlah 21 sekolah.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- b. Dokumentasi; Data dikumpulkan melalui hasil EDS, SQA dan dokumen lain yang relevan yang menunjang informasi tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- c. Wawancara; Wawancara dilakukan pada semua kepala sekolah, guru yang dipilih secara purposive (yang mewakili guru yang berkualifikasi sesuai dengan SPM dan yang tidak sesuai dengan SPM) serta staf Diknas maupun tokoh masyarakat.

Teknik Analisis Data

Setelah data berhasil dikumpulkan, menurut Miles dan Huberman data kualitatif dianalisis melalui tiga macam tingkatan (Emzir, 2010:129), yakni;

- a. Reduksi data; yaitu menyederhanakan data-data mentah yang diperoleh dari lapangan.
- b. Model Data; yaitu pendeskripsian data dan membuat keputusan tindakan lanjut, apa data tersebut sudah terpenuhi atau masih perlu ada tambahan informasi.
- c. Penarikan Kesimpulan; yaitu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Mamasa

Kondisi layanan pendidikan dasar yang diukur melalui pengumpulan data SPM dapat dilihat pada uraian berikut; untuk masing-masing indikator pencapaian (IP) standar pelayanan minimal (SPM) yang terdiri dari 27 indikator adalah sebagai berikut:

1. IP-1. Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
Dari hasil pengumpulan data SPM diketahui bahwa untuk IP-1 telah dapat dicapai (100%). Pada masa yang akan datang, pencapaian ini akan tetap dipertahankan melalui sosialisasi pada pemangku kepentingan sehingga tetap memperhatikan ketersediaan satuan pendidikan.
2. IP-2. Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru serta papan tulis;
Tingkat pencapaian IP-2 untuk SD/MI adalah 90,28% masih lebih baik dari SMP/MTs yaitu 78,72%. Dari 72 sekolah sampel SD/MI hanya 7 sekolah (9,72%) yang tidak mencai IP-2. Sedangkan untuk SMP/MTs yang tidak mencapai IP-2 adalah 10 (21,28%) sekolah dari 47 sekolah sampel.
3. IP-3. Di setiap SMP dan MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Dari 47 SMP/MTs sampel hanya 4 sekolah yang tercapai sedangkan 43 sekolah (91,49%) tidak tercapai yaitu dari segi memiliki ruang laboratorium dan kelengkapan meja dan kursinya. Kondisi ini bertambah buruk jika dilihat dari kelengkapan alat dan bahan praktek yaitu tidak ada satu sekolah pun yang memiliki kelengkapan alat dan bahan praktik (0%).

4. IP-4. Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah dan staff kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah yang terpisah dari ruang guru;

Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa keberadaan ruang guru masih sangat minim. Untuk SD/MI masih ada 53 sekolah dari 72 sekolah sampel (73,61%) yang belum memiliki ruang guru yang lengkap dengan perabotannya. Sedangkan untuk SMP/MTs masih ada 30 sekolah dari 47 sekolah sampel (63%) yang belum memiliki kelengkapan ruang guru dan perabotnya. Khusus untuk SMP/MTs masih ada 22 sekolah (46,81%) yang belum memiliki kelengkapan ruang kepala sekolah dengan perabotnya.

5. IP-5. Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;

Hasil pengumpulan data untuk IP-5 tentang kecukupan guru mengindikasikan bahwa kebutuhan guru telah mencukupi untuk SD/MI. Sesuai dengan aturan SPM maka semua sekolah sampel (72 sekolah) menyatakan jumlah guru telah mencapai SPM. (100). Namun demikian, hal ini bukan menjadi suatu yang menggembirakan, karena sebagian besar guru tersebut berstatus guru honor yang keberlanjutan dan kinerjanya masih diragukan.

6. IP-6. Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran.

Berbeda dengan SD, hasil pengumpulan data untuk SMP/MTs menyatakan sebaliknya, dari 47 sekolah sampel semua menyatakan guru tidak lengkap untuk semua mata pelajaran sehingga tingkat pencapaian IP-6 adalah 0%. Sebagian besar guru mengajar rangkap yang tidak sesuai dengan keahliannya. Keadaan ini cukup memprihatinkan, sehingga perlu segera diprogramkan pengadaan guru kontrak daerah yang diseleksi dan diangkat sesuai dengan kebutuhan sekolah. Menyadari program ini membutuhkan dana yang besar, maka program ini perlu dilaksanakan secara bertahap dan berdasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil.

7. IP-7. Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;

Dari hasil pengumpulan data diketahui bahwa masih ada 30,56% sekolah yang gurunya belum mencapai SPM (minimal 2 guru berkualifikasi S1 atau DIV). Demikian pula untuk aturan guru bersertifikat, masih ada 55,56% sekolah yang gurunya belum memenuhi SPM (guru S1 bersertifikat pendidik).



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

8. IP-8. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;

Untuk SMP/MTs, persentase sekolah yang kualifikasi gurunya belum memenuhi SPM adalah sekitar 29,79% (14 dari 47 sekolah). Sedangkan persentase sekolah yang gurunya belum memenuhi syarat memiliki sertifikat pendidik dan S1 adalah sekitar 59,57% (28 dari 47 sekolah).

9. IP-9. Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh diantaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik, untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%.

Dilihat dari jumlah SMP/MTs yang memiliki guru bersertifikat dan berkualifikasi S1 untuk setiap mata pelajaran, maka persentase sekolah yang belum memenuhi adalah 91,49% (43 dari 47 sekolah). Artinya masih banyak guru SMP yang belum disertifikasi karena berbagai alasan. Ada beberapa faktor penyebabnya, antara lain adalah guru belum S1 dan guru banyak berstatus honor yang belum memenuhi persyaratan untuk dapat disertifikasi.

10. IP-10. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Dari 72 Kepala sekolah SD, masih ada 33 orang (45,83%) yang belum memiliki kualifikasi akademik S1 dan bersertifikat pendidik. Hal ini disebabkan pengangkatan Kepala sekolah belum dilakukan sesuai standar kualifikasi dan kompetensi kepala sekolah. Berdasarkan keadaan tersebut, Didikpora Kabupaten Mamasa perlu melakukan proses seleksi dalam perekrutan kepala sekolah yang sesuai dengan standar kompetensi dan kualifikasi kepala sekolah secara konsisten.

11. IP-11. Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;

Tidak jauh berbeda dengan Kepala SD/MI, Untuk Kepala SMP/MTs masih ada sekitar 23,4% (11 dari 47 kepala sekolah) yang belum berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Dengan demikian, diperlukan proses rekrutmen kepala sekolah melalui seleksi kompetensi dan kualifikasi kepala sekolah. Selain itu, diprogramkan peningkatan kualifikasi kepala sekolah terutama kepada kepala sekolah yang memiliki kinerja yang baik.

12. IP-12. Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik.

Untuk pengawas, masih ada 14,5% (10 dari 69 orang pengawas) yang belum berkualifikasi S1 dan bersertifikat pendidik. Tidak berbeda dengan kepala sekolah, permasalahan ini disebabkan pengangkatan pengawas belum merujuk pada standar pengawas sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka diperlukan program rekrutmen pengawas melalui seleksi sesuai standar kompetensi dan kualifikasi pengawas. Bagi pengawas yang berprestasi diberikan program beasiswa untuk melanjutkan pendidikannya.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

13. IP-13. Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif;
Dalam Renstra Disdikpora kabupaten Mamasa tahun 2012-2014 terdapat 2 (dua) program yaitu program pelaksanaan Kelompok Kerja Guru (KKG) di gugus sekolah dan program pelaksanaan MGMP SMP. Pada program tersebut dilakukan kegiatan peningkatan kemampuan guru dalam menyusun KTSP terutama pada dokumen 2 yaitu penyusunan RPP dan silabus bagi para guru. Dua program tersebut telah dilaksanakan pada tahun 2012 dan 2013. Namun demikian, kegiatan tersebut masih perlu ditindaklanjuti dengan adanya kurikulum baru. Salah satu program yang penting untuk dilaksanakan adalah Program Pendampingan Implementasi Kurikulum 2013 kepada para guru.
14. IP-14. Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan;
Berdasarkan hasil pengumpulan data diketahui bahwa masih ada 45,83% SD (33 dari 72 sekolah) yang kunjungan pengawasnya ke sekolah binaannya tidak memenuhi SPM. Untuk kunjungan pengawas SMP/MTs lebih rendah lagi yaitu masih ada 74,47% (35 dari 47 sekolah) yang kunjungan pengawasnya tidak memenuhi SPM. Kinerja pengawas yang sangat rendah disebabkan oleh kualifikasi dan kompetensinya yang juga rendah serta motivasi kerja yang merosot (sebagian besar pengawas berusia 50 tahun ke atas).
15. IP-15. Setiap SD/MI menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
Untuk SD/MI, semua sekolah yang jadi sampel (72 sekolah) menyatakan tidak dapat memenuhi persyaratan jumlah set buku teks pelajaran untuk 5 mata pelajaran. Hal ini disebabkan tidak ada komitmen kepala sekolah dalam menganggarkan buku teks dalam pengalokasian Dana BOS untuk mencukupkan kebutuhan buku teks pelajaran. Namun untuk persentase pemenuhan buku teks secara umum masih ada 54,71% (2725 set buku teks) yang belum terpenuhi.
16. IP-16. Setiap SMP/MTs menyediakan buku teks yang sudah ditetapkan kelayakannya oleh Pemerintah mencakup semua mata pelajaran dengan perbandingan satu set untuk setiap peserta didik;
Untuk pemenuhan buku teks tingkat SMP/MTs secara umum masih ada kebutuhan 94,88% (6767 set buku teks) yang belum terpenuhi. Sama dengan SD/MI, tidak ada sekolah yang dapat memenuhi kebutuhan set buku paket sesuai SPM.
17. IP-17. Setiap SD/MI menyediakan satu set peraga IPA dan bahan yang terdiri dari model kerangka manusia, model tubuh manusia, bola dunia (globe), contoh peralatan optik, kit IPA untuk eksperimen dasar, dan poster/carta IPA;
Pada tingkat SD/MI masih ada 90,28% sekolah (65 dari 72 sekolah) yang belum memiliki set peraga dan bahan praktik IPA secara lengkap. Kepala



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

sekolah kurang memiliki komitmen dalam melengkapi peralatan praktik IPA melalui penganggaran dari BOS. Sebagian besar sekolah hanya berharap bantuan Disdikpora.

18. IP-18. Setiap SD/MI memiliki 100 judul buku pengayaan dan 10 judul buku referensi, dan setiap SMP/MTs memiliki 200 judul buku pengayaan dan 20 judul buku referensi.

Untuk tingkat SD/MI masih ada sekitar 81,94% (59 dari 72 sekolah) Sekolah yang belum memenuhi jumlah judul buku pengayaan dan buku referensi. Sedangkan untuk tingkat SMP lebih tinggi lagi yaitu sekitar 93,62 % sekolah (44 dari 47 sekolah) yang belum memenuhi kebutuhan buku referensi dan buku pengayaan sesuai dengan SPM. Kebutuhan buku-buku perpustakaan belum menjadi prioritas bagi pengelola baik ditingkat sekolah maupun di Disdikpora Kabupaten Mamasa.

19. IP-19. Setiap guru tetap bekerja 37,5 jam per minggu di satuan pendidikan, termasuk merencanakan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing atau melatih peserta didik, dan melaksanakan tugas tambahan.

Secara umum, masih banyak guru yang belum melaksanakan tugas minimal 37,5 jam dalam seminggu. Masih ada sekitar 15,57% guru (97 dari 623 guru) yang belum memenuhi aturan tersebut. Khusus untuk SD/MI masih ada 12,50% sekolah (9 dari 72 sekolah) yang guru-guru belum mencapai ketentuan tersebut. Sedangkan untuk SMP masih ada 10 sekolah dari 47 sekolah (21,28%) yang guru-gurunya belum memenuhi ketentuan IP-19.

20. IP-20. Satuan pendidikan menyelenggarakan proses pembelajaran selama 34 minggu per tahun dengan kegiatan pembelajaran perminggu sesuai ketentuan;

Secara umum, pemenuhan jumlah jam belajar setiap rombel diketahui bahwa masih ada sekitar 14,37 rombel (101 dari 703 rombel yang belum memenuhi ketentuan minggu efektif dan jam belajar minimal sesuai SPM. Khusus untuk SD/MI masih ada 27,78% sekolah (20 sekolah) yang belum memenuhi IP-20, sedangkan untuk SMP/MTs masih ada 23,40% sekolah (11 sekolah) yang belum memenuhi IP-20.

21. IP-21. Setiap satuan pendidikan menerapkan kurikulum - sesuai ketentuan yang berlaku;

Masih ada sekolah yang belum melaksanakan dan mengembangkan kurikulum. Untuk SD/MI masih ada 15,28% sekolah (11 sekolah) yang belum menerapkan KTSP, sedangkan untuk SMP/MTs masih ada 12,77% sekolah (6 sekolah yang belum menerapkan KTSP.

22. IP-22. Setiap guru menerapkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disusun berdasarkan silabus untuk setiap mata pelajaran yang diampunya;

Secara umum, jumlah guru yang belum menerapkan RPP berdasarkan silabus ada sekitar 24,24% guru (342 dari 1406 guru). Khusus untuk tingkat SD/MI masih ada 3 sekolah dari 72 sekolah (4,17%) yang guru-gurunya tidak tuntas dalam menyusun RPP, sedangkan untuk SMP/MTs masih ada sekitar 42,55% sekolah (20 sekolah) yang guru-gurunya belum tuntas menerapkan RPP sesuai silabus yang dimiliki.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

23. IP-23. Setiap guru mengembangkan dan menerapkan program penilaian untuk membantu meningkatkan kemampuan belajar peserta didik;
Secara umum sekitar 22,32% guru (315 dari 1411 guru). Khusus untuk tingkat SD/MI, semua sekolah (72 sekolah) menyatakan tidak memenuhi IP-23 (0% tercapai) atau ada guru-gurunya tidak mengembangkan dan menerapkan program penilaian. Pada tingkat SMP/MTs masih ada sekitar 38,3% sekolah (18 dari 47 sekolah) yang guru-gurunya belum mengembangkan dan menerapkan program penilaian.
24. IP-24. Kepala sekolah melakukan supervisi kelas dan memberikan umpan balik kepada guru dua kali dalam setiap semester;
Kepala SD/MI yang belum melaksanakan supervisi akademik untuk gurunya masih besar yaitu sekitar 97,22% kepala sekolah (70 dari 72 kepala sekolah). Keadaan sedikit lebih baik untuk kepala SMP/MTs, masih ada 68,09% kepala sekolah (32 dari 47 kepala sekolah) belum melakukan supervisi akademik kepada para gurunya.
25. IP-25. Setiap guru menyampaikan laporan hasil evaluasi mata pelajaran serta hasil penilaian setiap peserta didik kepada Kepala Sekolah pada akhir semester dalam bentuk laporan hasil prestasi belajar peserta didik;
Masih ada sekitar 24,45% guru (345 guru dari 1411 guru) yang belum melakukan pelaporan tersebut. Pada tingkat SD/MI masih ada 97,22% sekolah (70 sekolah) yang belum memenuhi ketentuan tersebut karena masih ada gurunya belum melakukan pelaporan, sedangkan untuk SMP/MTs masih ada 36,17% sekolah (17 sekolah) yang gurunya belum melakukan pelaporan hasil penilaian dan hasil evaluasinya.
26. IP-26. Kepala sekolah/madrasah menyampaikan laporan hasil Ulangan Akhir Semester (UAS) dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK) serta Ujian Akhir (US/UN) kepada orang tua peserta didik dan menyampaikan rekapitulasinya kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota pada setiap akhir semester;
Secara umum, pelaporan hasil ulangan dan ujian oleh sekolah hampir mencapai SPM namun, masih ada 2 sekolah (SD dan SMP) yang belum tuntas melakukan pelaporan tersebut. Khusus SD/MI masih ada 2 sekolah yang belum tuntas melakukan pelaporan (2,78%), sedangkan SMP/MTs masih ada 10,64% sekolah (5 sekolah) yang belum mencapai IP-26.
27. IP-27. Setiap satuan pendidikan menerapkan prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Sekolah (MBS);
Berdasarkan data yang dikumpulkan diketahui bahwa masih ada 10,08% sekolah (12 dari 119 sekolah) yang belum memiliki rencana kerja tahunan. Dari 119 sekolah SD dan SMP masih ada 15 sekolah (12,61%) yang belum memiliki laporan tahunan dan masih ada 18,49% sekolah (22 sekolah) yang belum memiliki komite sekolah yang berfungsi dengan baik.

Faktor-Faktor Yang Mendorong dan Menghambat Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kabupaten Mamasa

1. Faktor Pendorong



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

a. Tersedia Regulasi dan Pentunjuk Teknis

Beberapa informan telah mengetahui bahwa pemerintah telah membuat peraturan tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam SPM Pendidikan juga telah di ketahui sejumlah informan bahwa sudah beberapa kali mengalami revisi atau perubahan.

b. Komitmen Pejabat

Faktor pendukung lainnya dalam memenuhi SPM pendidikan adalah adanya komitmen yang tinggi dari pejabat daerah. Sejumlah informan, baik dari Diknas, DPAD, Kemenag dan Bappeda bahkan Bupati umumnya memberi informasi yang senada bahwa dukungan pejabat atau kepala kantor masing-masing menjadi faktor penentu dalam menjalankan perencanaan yang di dasarkan pada SPM.

c. Dukungan Stakeholder

Harapan untuk memenuhi standar pelayanan minimal pendidikan sesuai dengan target pemerintah dapat diwujudkan, karena dukungan pemerintah kabupaten pejabat dan stakeholder sangat tinggi. Ada dua kelompok stakeholder yang sangat memberi dukungan terhadap pelayanan minimal ini, Kelompok pertama adalah berada di posisi tingkat kabupaten, antara lain; anggota legislative, dewan pendidikan, bidang hokum dan bagian Ortala., PGRI , PERS local, Dunia industri Sedangkan kelompok kedua adalah di tingkat sekolah yakni komite sekolah.

2. Faktor Penghambat

a. Kondisi Geografis

Keadaan geografis Kabupaten Mamasa lebih dominan bukit dan lembah. Sehingga untuk menjangkau satu wilayah dengan wilayah lain sangat sulit, apalagi keadaan transportasi masih sangat terbatas.

b. Keterbatasan Anggaran (Biaya Pengawas)

Biaya adalah merupakan sentral dari keputusan melakukan suatu perencanaan dan kegiatan. Dana yang tersedia akan memudahkan perencana untuk membuat rancangan yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Dalam kaitan dengan penenuhan SPM diknas meski 27 indikator itu terpenuhi tidak semua dengan cara menyiapkan biaya, namun sangat diutamakan. Tidak ada bangun sekolah yang berdiri kokoh tanpa dengan persiapan biaya yang cukup, alat-alat lab, selain pengadaanya di perlukan pula biaya angkut menuju ke sasaran,

c. Kompetensi Kepala Sekolah Rendah

Kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah Nampak dari bergai hal, antara lain, mutu sekolah itu yang ditandai dengan nilai dan kelulusan peserta didik, keindahan, kerapian, keamanan dan kebersihan sekolah. Semua ini muncul jika kepala sekolah memiliki kompetensi managerial yang tinggi.

d. Jumlah Jam Kerja Guru Terbatas



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

Jam bekerja guru dalam SPM adalah 37,5 jam perminggu atau setara dengan 6,15 menit perhari dalam 6 hari sekolah. Jumlah jam kerja ini di dalamnya 24 jam adalah mengajar dan jam lainnya harus digunakan untuk membuar perencanaan dan mengevaluasi pembelajaran.

e. Peran dan Fungsi Komite Sekolah Belum Maksimal

Keradaan Komite sekolah sebagai mitra kepala sekolah telah diatur dalam Permendikbud No 044 tahun 2002. Lembaga ini lahir sebagai pengganti BP3 yang saat itu berperan dalam memungut iuran peserta didik. Proses pembentukannya di prakarsai oleh kepala sekolah, sehingga banyak komite sekolah yang hanya menjadi simbol saja.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Gambaran pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas) di Kabupaten Mamasa bahwa dari 27 indikator pencapaian (IP) hanya IP-1, IP-5, dan IP-13 yang pencapaiannya hingga 100%. Sedangkan IP yang lain belum tuntas karena masih banyak gap atau kekurangan-kekurangannya..
- b. Faktor yang mendorong pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas) di Kabupaten Mamasa adalah; tersedianya regulasi dan petunjuk teknis, komitmen pejabat, dan dukungan stakeholders. Sedangkan faktor yang menghambat pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dasar (SPM Dikdas) di Kabupaten Mamasa adalah; kondisi geografis, keterbatasan anggaran (biaya pengawas), kompetensi kepala sekolah rendah, dan jumlah jam kerja guru terbatas, serta peran dan fungsi komite sekolah belum maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, Don. 2005. *Pola-Pola Pendidikan dalam Masyarakat Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Barata, Atep Adya. 2004. *Dasar-Dasar Pelayanan Prima*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2015. *Modul K-1 Sosialisasi SPM DIKDAS Kepada Pemangku Kepentingan di Tingkat Kabupaten/Kota*.
- Fakih, Mansour dkk. 2001. *Pendidikan Populer Membangun Kesadaran Kritis*. Yogyakarta: ReaD Book.
- Freire, Paulo. 2007. *Politik Pendidikan: Kebudayaan, Kekuasaan dan Pembebasan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Freire, Paulo dkk. 1999. *Menggugat Pendidikan (Fundamentalis Konsevatif Liberal Anarkis)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



SEMINAR NASIONAL

“Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Membentuk Karakter Bangsa Dalam Rangka Daya Saing Global”

Kerjasama: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar dan Himpunan Sarjana Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial Indonesia
Grand Clarion Hotel, Makassar, 29 Oktober 2016

- Nugroho, Riant dan Tilaar. *Kebijakan Pendidikan: Pengantar Untuk Memahami Kebijakan Pendidikan dan Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Martono, Nanang. 2012. *Kekerasan Simbolik di Sekolah: sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Nugroho Riant. 2008. *Kebijakan Pendidikan Yang Unggul*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurhasyim. 2004. *Pengembangan Model Pelayanan Berdasarkan Prinsip Reinventing Government Yang Berorientasi Pada Pelanggan. Di Kabupaten Gresik*. Tesis. Surabaya: PPs Universitas Airlangga.
- Permendikbud No 15 tahun 2010 yang direvisi dalam Permendikbud Nomor 23 tahun 2013 tentang standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, Kemendikbud, Jakarta.
- Soyomukti, Nurani. 2010. *Teori-Teori Pendidikan: Tradisional, (Neo)Liberal, Marxis-Sosialis, Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Sirozi. 2010. *Politik Pendidikan: Dinamika Hubungan antara Kepentingan Kekuasaan dan Praktik Penyelenggaraan Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sukardjo dan Komaruddin Ukim. *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Surakhmad, Winarno. 2009. *Pendidikan Nasional: Strategi dan Tragedi*. Jakarta: Kompas.
- Tilaar. 2006. *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2009. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Paedagogik Transformatif Untuk Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tjiptono, Fandy. 2004. *Manajemen Jasa*. Yogyakarta: Andi Press.
- Tuti dan Sam. 2010. *Analisis SWOT: Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman Husaini. 2008. *Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Yamin, Martinis. 2008. *Paradigma Pendidikan Konstruktivis*. Jakarta: GP Pers.
- Zubaedi. 2011. *Desain Pendidikan Karakter: Konsepsi dan Aplikasinya dalam Lembaga Pendidikan*. Jakarta: Kencana.